

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sehubungan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peningkatan dan transparansi serta akuntabilitas pada organisasi nirlaba, tentunya untuk memberikan informasi diharapkan dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana dari berbagai sumber daya dengan membuat laporan keuangan. Dalam kenyataannya pelaporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi mendapatkan laba namun juga untuk organisasi yang tidak berorientasi mendapatkan laba atau organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi yang berorientasi laba berbeda dengan organisasi nirlaba.

Perbedaan yang paling utama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Organisasi nirlaba memperoleh dana dari para anggota maupun dari penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, tujuan organisasi nirlaba adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Organisasi nirlaba seperti gereja juga membutuhkan informasi akuntansi seperti halnya organisasi yang bertujuan mencari laba. Walau organisasi gereja tidak mencari laba, namun pada hakekatnya organisasi nirlaba tetap harus berurusan dengan laporan keuangan, karena organisasi gereja tetap

harus memiliki anggaran dalam membayar fasilitas organisasi, seperti listrik, air, telepon, serta urusan-urusan yang berkaitan dengan keuangan, semua hal tersebut berkaitan dengan akuntansi.

Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi nonlaba ini didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan organisasi nonlaba ini juga bisa di dapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk kebutuhan operasionalnya bisa di dapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Namun hal ini berakibat pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran yang penting bagi para pemakai dari laporan keuangan yayasan tersebut. Menurut Ikhsan (2010:3).

Standar akuntansi keuangan untuk otoritas nonlaba adalah ISAK No. 35 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 1 Januari 2020 yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Karakteristik organisasi nonlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nonlaba memperoleh sumber daya dari para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan kembali. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nonlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak

pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan.

Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Bastian (2001:76-77) siklus akuntansi di kelompokkan dalam tiga tahap yaitu : tahap pencatatan yang terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, jurnal, posting ke buku besar, tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Dan tahap pelaporan terdiri dari neraca, laporan surplus dan defisit, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih dan catatan atas laporan keuangan.

Gereja merupakan organisasi yang mengelola keuangan dan sumber daya yang diberikan para jemaat. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang telah diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK NO.35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, isi dari pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi nonlaba bahwa organisasi nonlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Karena itu Gereja juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan yang akuntabilitas dan melaporkan kepada pemakai laporan keuangan gereja yaitu jemaat dan donatur yang merupakan sumber utama dalam pendapatan gereja agar termotivasi untuk lebih giat memberikan persembahan syukur serta bantuan dana untuk menopang pelayanan gereja.

Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jalan Gereja HKBP Marantha silamosik II adalah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pelayanan rohani atau keagamaan kepada masyarakat dan disebut juga sebagai organisasi nirlaba. Informasi keuangan yang dihasilkan bukan hanya untuk pihak manajemen Gereja (Badan Pekerja Harian Jemaat), tapi juga untuk masyarakat atau jemaat gereja sebagai bentuk pertanggung jawaban atas sumbangan yang mereka berikan. Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Gereja HKBP Maranatha silamosik sangatlah sederhana, yaitu berupa format yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang direkap bulanan dan tahunan.

Gereja Kristen memiliki tata organisasi atau anggaran dasar berdasarkan surat pendirian gereja dan didaftarkan secara hukum sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang yayasan. Kegiatan administrasi keuangan gereja meliputi pembutan anggaran belanja dan pendapat gereja. Laporan keuangan gereja terdiri dari laporan keuangan mingguan dan tahunan semuanya di pertanggung jawabkan secara berkala setiap tahunnya dan disampaikan kepada anggota jemaat setiap minggunya.

Pendapatan dari Gereja HKBP Maranata Silamosik diperoleh dari hasil sumbangan dari jemaat gereja ataupun non jemaat, dari hasil persembahan setiap melakukan ibadah, lalu sekali dalam setahunnya HKBP Maranata Silamosik mengadakan lelang yang diikuti oleh jemaat gereja yang hasil dari itu semua akan dikelola oleh pengurus-pengurus gereja dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan gereja dan juga jemaat gereja dengan persetujuan oleh pusat. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat berbeda dengan organisasi bisnis karena aktivitas organisasi nirlaba berasal dari jemaat dan untuk jemaat. Penerapan ISAK No. 35

dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para donator untuk mengetahui kinerja organisasi.

Setiap melakukan ibadah gereja HKBP Maranatha Silamosik II Resort Naga Timbul memperoleh persembahan dari kebaktian umum (persembahan sekolah minggu, persembahan Ia, Ib, II, III dan ke IV untuk pembangunan) persembahan kebaktian kategorial (Ina Hanna, Ina Huria, Ama Huria, dan NHKBP), Persembahan/Perpuluhan/Ucapan Syukur (persembahan mingguan, persembahan tahunan, dan persembahan acara syukuran (seperti persembahan memasuki rumah, lelang, dan hasil pesta).

Hasil dari dana pada gereja ini juga digunakan untuk pembayaran honor tata usaha, honor pendeta, honor sekretaris, honor bendahara, honor team Audit, transport kegiatan parhalado, trasport kegiatan pendeta, honor pianis gereja, biaya listrik, air, telepon dan ATK, THR tata usaha, THR pendeta, transport parjamita dan pembelian sembako untuk keperluan gereja. Dalam entitas nonlaba terjadi kegiatan ekonomi yang memerlukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai rangka mempertanggung jawabkan kegiatan dalam satu periode. Salah satu bentuk organisasi dalam entitas organisasi non laba adalah gereja.

HKBP sebagai lembaga berbadan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah, berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.701/DJA/1986, tanggal 17 Nopember 1986. Sebagai sinode, HKBP berdudukan dan berkantor di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kelembagaan dituntut untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen HKBP (Badan Pengurus Majelis Jemaat), bentuk

pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan jemaat telah di gunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan jemaat.

Salah satu wujud HKBP ialah HKBP Maranatha Silamosik yang terletak di desa Silamosik. Hanya sering terjadi permasalahan pada gereja terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No.35 dengan alasan bahwa gereja adalah organisasi keagamaan sehingga diselesaikan berdasarkan kasih. Kurangnya SDM dan keterbatasan waktu mengambil peran untuk memahami penyusunan laporan keuangansesuai ISAK No.35 sehingga Gereja HKBP Silamosik ini masih menggunakan basis kas dan penyajian laporan keuangannya hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Selain masalah SDM yang terbatas memiliki pencatatan keuangan yang baik sangat penting karena menyangkut kepercayaan jemaat yang menyumbangkan dananya untuk kebutuhan operasional gereja dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas gereja.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, ada beberapa peneliti menyimpulkan bahwa beberapa Entitas Berorientasi Nonlaba belum sepenuhnya menerapkan standar ISAK No 35. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Nelva Susanti (2020) dengan judul Analisis Penerapan ISAK No.35 Terhadap Laporan Keuangan pada Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh yaysan MTS Al-Manar belum sesuai dengan ISAK No.35. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Diviana (2020) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan

ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi, dimana peneliti memperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus masjid Baitul Haadi telah sesuai dengan ketentuan implementasi penyajian laporan keuangan ISAK 35.

Berdasarkan kedua riset penelitian dengan kesimpulan yang berbeda, yang dilakukan sebelumnya mengenai penerapan standar akuntansi 7 keuangan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, maka penulis pun juga tertarik untuk melakukan penelitian pada organisasi sektor publik yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan, dimana peneliti melakukan penelitian pada Gereja HKBP Silamosik. Gereja HKBP Silamosik memiliki perbedaan dalam hal penyusunan laporan keuangan, baik dari segi aktivitas perusahaan proses Pendanaan dimana pendanaan diperoleh dari masyarakat yang memiliki tingkat pertanggungjawaban sangat besar, layanan jasa yang diberikan penggunaan dan alokasi dana perusahaan dimana gereja HKBP Silamosik berorientasi pada misi kemanusiaan, tanggap darurat, dan bencana alam baik dalam negeri maupun mancanegara khususnya negara-negara berkonflik yang berkepanjangan dengan krisis kemanusiaan yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut dan mengingat pentingnya akuntansi dan dalam hal pelaporan keuangan pada organisasi gereja maka dengan ini diharapkan secara keseluruhan pedoman pelaporan keuangan yang terdapat penerapan ISAK No.35 dapat dicapai sesuai dengan tingkat paling ideal yang diharapkan pada perusahaan.

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan adalah “**Analisis Penerapan Isak No. 35 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Gereja HKBP Maranatha Silamosik**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan masalah yang ada yaitu **bagaimanakah Penyajian Laporan Akuntansi keuangan pada Gereja HKBP Marantaha Silamosik Resort Naga Timbul sesuai dengan Penerapan ISAK Nomor 35?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan akuntansi keuangan pada gereja HKBP Maranatha Silamosik berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dan memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat meningkatkan dan menambah wawasan dan pengetahuan lebih lagi dalam penerapan akuntansi organisasi nirlaba, juga untuk menguatkan teori yang sudah diperoleh dalam perkuliahan selama menempuh pendidikan tentang lembaga non-profit atau organisasi nirlaba serta dapat membandingkannya dengan praktik yang sesungguhnya terutama mengenai penerapan ISAK No. 35 tentang penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba.

2. Bagi lembaga yang diteliti

Dapat memberikan manfaat atau masukan yang berguna untuk menghasilkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum atau ISAK No. 35 pada organisasi nirlaba atau

non-profit baik untuk pengguna internal maupun eksternal.

3. Bagi penulis lainnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang serupa pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sistem kegiatan kerja sama dengan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan pencapaian tujuan bersama. Menurut Mulya di dalam buku Timotius Duha menyatakan Organisasi pada hakekatnya adalah sekelompok orang yang memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yang secara bersama sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu, atau menyelesaikan tugas tertentu.

Sedangkan menurut Tre Wathan Newrpot dalam buku Timotius Duha menyatakan Organisasi adalah sebuah struktur sosial yang didesain guna mengoordinasikan kegiatan dua atau lebih, melalui suatu pembagian kerja, dan hierarki otoritas, guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu.

Organisasi Sektor Publik Istilah sektor publik memiliki definisi yang beragam di berbagai negara, lingkup organisasi sektor publik sering tidak sama. Berbagai organisasi termasuk dalam lingkup sektor publik di Indonesia antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), Badan Umum Milik Negara (BUMN), Badan Umum Milik Daerah (BUMD), organisasi di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik bisa dipahami sebagai organisasi di mana aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Nordiawan (2015), sektor publik merupakan sebuah

organisasi ekonomi yang mempunyai keunikan tersendiri.

Disebut sebagai organisasi ekonomi karena sumber daya ekonomi yang dimiliki tidaklah kecil. Sektor publik juga melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan organisasi ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari profit, sumber daya ekonomi sektor publik dikelola bukan untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Hal ini sejalan dengan pernyataan Bigliardi (2012), di mana tujuan utama organisasi sektor publik bukan untuk memperoleh laba melainkan untuk menciptakan nilai bagi organisasi tersebut, sektor publik terfokus pada misi organisasi dan menganggap masyarakat sebagai klien.

2.1.2 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para tugas pemerintah. Organisasi nirlaba bisa berbentuk organisasi tersebut memiliki kesamaan dalam tujuan organisasi, yaitu memberikan jasa (layanan) dan tidak mencari laba.

Tapi tiap jenis organisasi tersebut bisa berbeda dalam hal sasaran, sumber pendanaan dan tingkat otonomi. Organisasi nirlaba dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Instansi pemerintah, dalam penerapan akuntansinya tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bukan instansi pemerintah, dalam penerapan akuntansinya berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45, tentang pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba.

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia bahwa organisasi nirlaba (*non profit organization*) adalah organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari (laba). Menurut Renyowijaya : Organisasi nirlaba adalah menerima kontribusi sumbangan dana dalam jumlah signifikan dari pemberi dana yang di rumah sakit, sekolah sekolah tinggi dan universitas tinggi. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya (laba).

Dalam hal kepemilikan, tidak di jelaskan sesungguhnya siapa pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota , klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya.

Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris , yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilaksanakan. Anggota dewan komisaris bukanlah ‘pemilik’ organisasi.

2.1.3. Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Menurut Nordiawan, organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan fundamental.

- b. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
- c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.
- d. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi.
- e. Didasarkan pada konsensus.

2.2 Gereja

2.2.1 Pengertian Gereja

Kata “Gereja” berasal dari kata bahasa Portugis yaitu “*Igreja*” yang memiliki arti yaitu kawanan domba yang di kumpulkan seorang gembala dan dalam bahasa Yunani “Gereja” disebut “*Ekklesia*”, yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*ek*” yang artinya keluar dan “*kaleo*” yang artinya memanggil, sehingga kata “*Ekklesia*” dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Untuk lebih memperjelas lagi pemahaman tentang apa itu Gereja, maka berikut adalah gambaran-gambaran Gereja yang ada dalam Alkitab :

- a. Gereja adalah Tubuh Kristus

“1:22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada 1:22 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu”. (Efesus 1:22-23).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa “Kristus ‘ adalah kepala. Kristus adalah yang memanggil, maka gereja berasal dari Kristus sendiri. Gereja bukanlah kelompok manusia atau kumpulan orang yang berdiri atas inisiatif sendiri, tetapi Kristuslah yang dengan perantara Firman dan Roh

mengumpulkan bagiNya orang orang itu. Kepada gereja “tubuh” hanya dapat digunakan jika kepada kristus digunakan lambang sebagai “kepala”. Dalam gambaran ini, yang terpenting bukanlah tubuh, melainkan kepala. Kristus dilihat bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai prinsip kehidupan dari seluruh tubuh. Gereja disebut “tubuh Kristus” karena mengambil bagian hidup Kristus.

b. Gereja adalah Bait Allah

Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? (1 Korintus 3:16).⁷

2:19 demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang orang kudus dan anggota anggota keluarga Allah, 2:20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 2:21 Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. 2:22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh (Efesus 2:19-22).

Gambaran di atas merupakan gambaran dimana gereja merupakan gambaran atau suatu bangunan, tetapi gereja dilambangkan sebagai bangunan Bait Allah tersebut.

c. Gereja adalah Kawanan Domba Allah

Tuhan Yesus Kristus adalah “gembala” dan gereja adalah “domba”. Sebagai gambaran gembala sering membawa tongkat dan lonceng kecil. Tongkat digunakan untuk melindungi domba dan lonceng sebagai

penuntun jalan bagi domba, karena domba memiliki keterbatasan di dalam penglihatan. Disini diingatkan akan kasih dan pemeliharaan-Nya bagi gereja-Nya dalam memberi makan, memimpin dan melindungi dari bahaya dan juga mengingatkan terhadap ketergantungan manusia akan dia, dan ketidak berdayaan manusia di luar pemeliharaan-Nya.

d. Gereja adalah Pengantin Kristus

“Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus (2 Korintus 11:2)”.

Disini gambaran tersebut menekankan betapa intimnya kasih Kristus kepada gereja-Nya, dan pemeliharaan penuh-Nya bagi pengantin-Nya. Gereja memiliki tanggung jawab sebagai pengantin wanita untuk menjaga diri agar tetap murni dan tidak bercela bagi pengantin prianya, yaitu Tuhan Yesus Kristus.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis gereja yang tergabung dalam organisasi/Komunitas Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) antara lain: Huria Kristen Batak Protestan Indonesia (HKBP), Banua Niha Keriso Protestan Indonesia (BNKP), Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Toraja, Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK), Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII), dan sebagainya.

2.2.2 Gereja sebagai Organisasi Keagamaan dan Nirlaba

Menurut Indra Bastian secara etimologis, organisasi keagamaan adalah dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama

tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama dan kepercayaan tertentu. Organisasi keagamaan dalam hal ini mengacu pada Masjid, Gereja, Kapel, Kuil, klenteng, Wihara, maupun Pura ataupun diluar bidang lainnya yang bergerak dalam organisasi keagamaan.

Dari segi penyelenggaraan, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi dalam agama tersebut. Banyak yang memberikan pertanyaan benarkah ilmu akuntansi ada dalam agama dalam hal ini baik agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Islam, karena sebagaimana di pahami oleh banyak orang dan kalangan agama hanyalah kumpulan norma yang lebih menekankan pada persoalan moralitas.

Ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Di dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit atau Tuhan” perlu penerjemahan dan penafsiran sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial ekonomi umat. Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, hutang piutang, pembayaran pajak, pemberian persembahan dan sewa-menyewa.

Seperti halnya dalam Kitab suci agama Kristen :

- a. Maleaki 3:10 tentang persembahan ke dalam rumah Tuhan, “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kedalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di Rumah-ku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan”.

- b. Imamat 25:14 tentang kegiatan jual-beli, “Apakah kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain”.
- c. Matius 18:24-27 tentang hutang-piutang “Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia di jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya “Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya”.

Dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa di dalam agama, sistem pencatatan yang telah diperintahkan memiliki tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan diantara kedua belah pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut di interpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggung jawaban (pembuatan laporan keuangan).

Menurut Indra Sebastian:

Menilik secara jelas apa yang timbul pada organisasi keagamaan, organisasi lembaga peribadatan dikategorikan kedalam organisasi nirlaba. Hal ini disebabkan oleh gerak dan orientasi pada organisasi keagamaan seirama dengan organisasi yang berjenis nirlaba. Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah sumbangan dana yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang di layani, dan biaya overhead yang mampu diminimalisasikannya. Tujuan organisasi keagamaan atau gereja adalah memberikan layanan kepada umat pengikut agamanya dan menyelenggarakan

seluruh aktivitas yang di butuhkan maupun yang telah menjadi ritual rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Sama halnya dengan gereja yang menjalankan Tritugas panggilan gereja yaitu Bersaksi (Marturia), Besekutu (koinonia), dan melayani (Diakonia). Meskipun tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada umat/jemaat, namun tidak berarti gereja sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan.

Menurut Indra Bastian:

Dari segi sumber pendanaan atau lebih kongkretnya struktur modal dan struktur pembiayaan, keagamaan sangat berbeda dalam hal bentuk dan jenisnya. Sumber pendanaan organisasi keagamaan berasal dari umat dan sumbangan-sumbangan pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai suatu umat satu agama.

Dalam gereja sumber pendanaannya berbeda dari perusahaan pada umum yang bersifat mencari dan mendapatkan laba. Adapun sumber pendanaan gereja yang utama ialah berasal dari jemaat dan non-jemaat yang sifatnya wajib atau sukarela.

Menurut Indra Bastian:

Adapun dalam konteks pola pertanggungjawaban, jika organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik usaha dan kreditornya, maka pertanggungjawaban organisasi keagamaan dilakukan kepada seluruh umat yang telah memberikan amanahnya, dan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang di jalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat terpenuhi, maka implikasinya dapat berwujud

ketidakpercayaan, ketidakpuasan, atau bahkan fitnah.

Pertanggungjawaban pada gereja sebagai bentuk nyata bahwa pengelolaan sumbangan dan dana gereja telah di gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan jemaat. Apabila pertanggungjawaban tidak jelas atau tidak sesuai dengan harapan jemaat, maka akibatnya adalah berkurangnya kepercayaan jemaat, tidak puas, bukan dianggap dianggap oleh jemaat pengelolaan keuangan telah dikorupsi atau telah melanggar perintah Allah (menimbulkan fitnah).

Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang pertanggungjawabannya kepada pemilik atau investor. Apabila pertanggungjawaban investor, dapat berakibat berkurangnya investasi pemilik atau bahkan investor tidak mau lagi berinvestasi ke dalam perusahaan.

Menurut Indra Bastian “Apabila dilihat dari karakteristiknya, anggaran organisasi keagamaan sangat bersifat terbuka bahkan umat dapat melihatnya sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini terjadi karena anggaran berasal dari umat dan perkembangan organisasi keagamaan tersebut, pada umatnya, merupakan tanggungjawab umat secara kolektif.” Anggaran maupun laporan keuangan gereja, sangat terbuka dan dapat dilihat kapan pun oleh seluruh warga jemaat.

Sedangkan pada laporan anggaran perusahaan hanya digunakan dan dilihat oleh manajemen dalam perusahaan, tidak disajikan kepada pemilik atau pihak-pihak eksternal lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan. Hanya laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh manajemen kepada pemilik maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2.3 Perbedaan Organisasi Laba dan Organisasi Nirlaba

Menurut Nordiawan, secara umum yang membedakan secara signifikan

antara organisasi sektor publik dengan perusahaan adalah:

a. Tujuan Organisasi

Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.

b. Sumber-sumber pendanaan

Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan yang bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sedangkan organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Dalam organisasi pemerintahan ini direalisasikan melalui pembayaran pajak dan retribusi, termasuk sumbangan atau subsidi dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.

Di organisasi sektor publik lain (non-laba non-pemerintahan), seperti gereja, masjid, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota atau jemaat/jamaah subsidi atau sumbangan dari donatur.

Menurut Mardiasmo (2004) dalam buku V. Wiratna Sujarweni, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan dengan beberapa hal, yaitu:

a. Tujuan organisasi

Untuk swasta adalah mempunyai tujuan utama melakukan usaha untuk mencari laba. Sedangkan sektor publik, penyediaan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan lain sebagainya.

b. Sumber Pembiayaan

Sumber pendanaan sektor swasta dari modal pribadi ataupun sekelompok orang. Sedangkan untuk sektor publik pendanaan berasal dari pajak retribusi, pendapatan daerah dan lain sebagainya.

c. Pola Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemilik modal, sedangkan sektor publik perlu di pertanggungjawabkan kepada masyarakat karena sumber dana berasal dari masyarakat.

d. Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel, seperti yang di kehendaki oleh manajemen dan pemilik modal, Sedangkan sektor publik mempunyai struktur organisasi yang birokratis.

e. Karakteristik Anggaran

Anggaran pada sektor swasta itu tidak dipublikasikan, sedangkan pada sektor publik wajib untuk di publikasikan.

f. Sistem Akuntansi yang digunakan

Sistem akuntansi swasta lebih banyak menggunakan basis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan basis kas.

2.4 Ruang Lingkup dan Permasalahan ISAK 35.

Entitas berorientasi nonlaba terlepas dari apapun bentuk hukumnya, ISAK hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas nonlaba tersebut mengacu kepada SAK atau SAK- ETAP masing-masing yang relevan. DK 04.

Ruang lingkup DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas

Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari ISAK I: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 DK05. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pernyataan standar akuntansi keuangan ISAK No. 35 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi yang berorientasi mencari dan memperoleh laba atau organisasi bisnis.

DK06. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba.

DK07. Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan entitas merupakan suatu entitas berorientasi non laba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini.

Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah :

- a. Apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;

- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi nonlaba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposal pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

Perbedaannya terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang atau donatur lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Karakteristik Organisasi Nirlabamenurut Ikatan Akuntan Indonesia karakteristik organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya organisasi nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang di berikan.
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan menumpuk laba, dan jika organisasi nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat di jual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi nirlaba.

Larson (n.d) menyebutkan sifat-sifat unik suatu organisasi nirlaba, beberapa sifat unik dapat dilihat untuk membedakan penerapan karakteristik organisasi nirlaba di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Manajemen dan Kepemimpinan

Pokok penting dari setiap organisasi nirlaba yang sukses adalah mempunyai pemimpin dan pengurus yang efektif. Para pemimpin tersebut harus dapat bekerja sama dengan visi, kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Pembagian kepemimpinan dapat dilihat dari kemampuan manajemen pengurus yang baik yang cukup handal untuk bekerja dengan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang strategis.

2. Nilai Organisasi

Nilai yang tertanam dalam tenaga pendorong pada organisasi nirlaba, nilai yang di garis bawahi disini adalah organisasi berdiri dalam mewujudkan misi sosial bukan untuk mendapatkan laba. Hal ini menjadi masalah yang kompleks bagi pemimpin. Beberapa masalah tersebut contohnya adalah bagaimana program dapat disepakati, kemajuan dimonitor dan sukses diukur, bagaimana prioritas ditetapkan dan disepakati, kemajuan dimonitor dan sukses diukur, bagaimana prioritas ditetapkan dan di sepakatan dicapai, bagaimana karyawan dihargai apakah sesuai untuk diaplikasikan dalam organisasi. Konsultan yang handal di perlukan dari waktu ke waktu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dengan berfokus pada sistem manajemen organisasi yang baik.

3. Sifat khas perencanaan nirlaba

Sebagian besar organisasi nirlaba tidak memiliki banyak waktu, uang dan sumber daya untuk membuat strategi rencana yang mutakhir dan teliti. Fokus dari organisasi biasanya pada ,masalah utama yang dihadapkan pada organisasi nirlaba dan secepat mungkin mencari solusi untuk masalah tersebut. Tantangan utama bagi fasilitator organisasi adalah bagaimana melatih personil organisasi untuk membuat konsep perencanaan dan prosesnya, membantu organisasi untuk membuat konsep perencanaan dan prosesnya, membantu organisasi nirlaba untuk fokus dan tetap bertahan walaupun memiliki sumber daya yang terbatas.

2.4.1 Laporan Keuangan Gereja

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba termasuk gereja. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran atau imbalan apapun dari gereja yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi di dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan.

Misalnya, pada beberapa bentuk gereja, meskipun tidak ada kepemilikan, gereja juga mendanai kebutuhan modalnya dari hutang dan kebutuhan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja

penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

2.4.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap, laporan posisi keuangan atau neraca adalah “Laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*, atau sering disebut per tanggal tertentumisalnya per tanggal 31 Desember 2005, posisi yang digambarkan adalah posisi aktiva, kewajiban, dan modal”.

Tujuan laporan keuangan dalam ISAK 35 yaitu “untuk menyediakan informasi mengenai aset, laibilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapa, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain untuk menilai :

- a. Kemampuan organisasi nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
- c. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas keuanga, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa

dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

Berikut adalah unsur-unsur Laporan Posisi Keuangan:

- a. Aktiva, menurut FASB (1985) dalam buku Sofyan Syafri Harahap. “Aktiva atau aset didefinisikan sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu”.
- b. Kewajiban, menurut IAI melalui KDPPLK (1994) dalam buku Adnan Silaban dan Hamonangan Siallagan: “kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban atau hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang dalam bentuk aktiva atau pemberian jasa, yang ditimbulkan dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban atau hutang terbagi menjadi: kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban lancar, adalah kewajiban yang diperkirakan akan di bayar dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus.

Operasi normal organisasi. Pos-pos kewajiban lancar yaitu, hutang usaha, hutang wesel jangka pendek, beban yang masih harus di bayar (misalnya: utang gaji pendeta, hutang bunga, hutang upah pembersih gereja, hutang gaji pegawai kantor gereja, hutang pada kantor pusat), pendapatan

diterima dimuka (misalnya: sewa diterima di muka atas penyewaan gereja).

2. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diperkirakan tidak akan di bayar dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal organisasi. Pos-pos kewajiban tidak lancar yaitu: hutang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang dan kewajiban tidak lancar lainnya.
3. Aktiva Netto atau Aktiva bersih, menurut ISAK 35: “Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu, terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat”.

“Sumbangan terikat atau sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya di batasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau pemberi sumber daya. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer”.

4. Aktiva bersih terikat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumbangan yang tidak diharapkan adanya pelunasan kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen (bersifat abadi), tetapi organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan lain yang berasal dari sumber daya atau sumbangan tersebut. Misalnya, aset beasiswa untuk anggota jemaat yang melanjutkan pendidikan.
5. Aktiva bersih terikat temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditentukan oleh penyumbang atau pemberi sumbangan dan tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali, yang menetapkan agar

sumbangan tersebut dapat tercapai dan dapat dipertahankan sampai pada waktu tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Misalnya: aset pembangunan gedung gereja.

6. Aktiva bersih tidak terkait adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau pemberi sumbangan. Misalnya: Sumbangspontanitas dari jemaat untuk keperluan operasi gereja dan iuran setiap tahun dari jemaat.

b. Laporan Arus Kas

Menurut Indra Bastian, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan arus kas, perubahan posisi kas akan dilihat dari tiga sisi, yakni dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Dengan melihat laporan arus kas ini dapat diketahui asal sumber pendanaan suatu organisasi dan untuk apa saja sumber dana tersebut digunakan dalam kegiatan operasional.

Berikut adalah unsur-unsur Laporan Arus Kas:

1. Aktivitas Operasional Menurut Sofyan Syafri: “kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan atau tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan”.

Contoh arus kas masuk dari kegiatan aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan kas dari jemaat maupun non-jemaat. Misalnya: Sumbangan kolekte dari jemaat untuk keperluan operasi gereja.

2. Penerimaan pendapatan bunga deviden. Misalnya: Pendapatan bunga atas rekening giro gereja di bank. Contoh, arus kas keluar dari kegiatan aktivitas operasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran untuk membayar gaji atau honor pendeta, staf kantor gereja, biaya listrik, air dan telepon gereja.
 - b. Pembayaran untuk pembelian alat tulis kantor gereja.
 - c. Pembayaran kas sumbangan jemaat kepada kantor pusat atau sinode.
3. Aktivitas pendanaan yaitu kegiatan yang termasuk aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal atau aktiva bersih dan pinjaman jangka panjang organisasi, berupa mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu.

Tabel 2.3

ENTITAS NIRLABA	
Laporan Arus Kas	
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021	
(dalam Rp juta)	
AKTIVITAS OPERASI	
Kas dari pendapatan jasa	xxx
Kas dari pemberi sumber daya	xx.xx
Kas dari piutang lain-lain	xxxx
Bunga dan deviden yang diterima	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxxx
Bunga yang di bayarkan	xxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	-xxxx
Utang lain-lain yang dilunasi	xx
<i>Kas neto yang diterima (Digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	-xx
AKTIVITAS INVESTASI	
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	xxx
Pembelian peralatan	xxxx
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxxxxx
Pembelian investasi	xxxxxxx
Kas yang diterima (Digunakan) untuk aktivitas investasi	-xxx
AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	xxx
Investasi dalam Endowment	xxx
Investasi dalam Endowment berjangka	xxxx
Investasi dalam bangunan	xxx
Investasi perjanjian tahunan	xxxx
Aktivitas pendanaan lain:	
Bunga dan deviden terbatas untuk reinvestasi	xxx
Pembayaran kewajiban tahunan	-xxx
Pembayaran utang wesel	-xxxx
Pembayaran liabilitas jangka panjang	-xxxx
	-xxxx
<i>Kas neto yang diterima (Digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	-xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA	
KAS	-xxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	xxxx
KAS DAN SETARA PADA AKHIR TAHUN	xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, **PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba**, Tahun 2021

D. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca laporan keuangan dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai pikiran-pikiran yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Berikut ini disajikan contoh catatan atas laporan keuangan organisasi nirlaba atau gereja berdasarkan ISAK No. 35 :

Catatan A

Organisasi menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau kativa lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak diharapkan pembayaran kembali telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah terpenuhi aset netto terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset netto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset netto yang dibebaskan dari pembatasan.

Organisasi menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau

aset lainyang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu pengguna aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

Catatan B

Aset neto terikat temporer untuk periode-periode keungan adalah sebagai berikut:

Aktivitas program A:

Pembelian peralatan	Rp xxxx
Penelitian	xxxx
Seminar dan publikasi	xxxx
Aktivitas program B:	
Perbaikan kerusakan peralatan	xxxx
Aktivitas program C:	
Umum	xxxx
Bangunan dan peralatan	xxxx
Perjajian perwalian tahunan	xxxx

Untuk periode setelah 31 Desember 19X1 Rp xxxx

Catatan C

Aset neto terikat permanen dibatasi untuk: investasi tahunan, penghasilannya dibelanjakan untuk mendukung:

Aktivitas program A	Rp xxxxxx
Aktivitas program B	xxxxxx
Aktivitas program C	xxxxxx
Kegiatan lain entitas	

Dana yang penghasilannya untuk di tambahkan Pada jumlah sumbangan awal hingga Mencapai nilai Polis asuransi kematian yang penerimaan ganti rugi asuransi atas kematian pihak yang diasuransikan tersedia untuk mendanai aktivitas umum

Rp xxx

Tanah yang harus digunakan untuk area rekreasi

Catatan D

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali melalui terjadinya beban tertentu atau terjadinya beban tertentu atau terjadi kondisi yang diisyaratkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Tujuan pembatasan yang tercapai

Beban program A	Rp xxxxx
Beban program B	xxxxx
Beban program C	
Peralatan untuk program A yang dibeli dan di manfaatkan	xxxx
Pembatasan waktu yang telah terpenuhi:	
Jangka waktu yang telah terpenuhi	Rp xxxx
Kematian pemberian sumber daya tahunan	Rp xxxx
	Rp xxxx Rp xxx

Catatan F

Beban-beban yang terjadi adalah:

	Program			Manajemen & Umum	Pencarian Dana	Total
	A	B	C			
Gaji, upah	18.500,0	9.750	4.312,5	2.825,0	2.400,0	Rp37.787,5
Biaya lain-lain	5.187,5	1.875,0	4.312,5			11.875,0
Suplies dan Perjalanan	2.162,5	2.500,0	1.225,0	600,0	1.400,0	7.887,0
Biaya jasa dan profesional	400,0	3.725,0	1.500,0	500,0	975,0	7.100
Kantor dan Pekerjaan	2.900,0	1.500,0	1.125,0	545,0	250,0	6.320,0
Depresiasi	2.600,0	2.000,0	1.425,0	625,0	350,0	8.000,0
Bunga				955,0		955,0
Jumlah Beban	32.750,0	21.350,0	14.400,0	6.050,0	5.375,0	79.925,0

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Revisi 2021

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dapat dikemukakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Hendrawan (2011) tentang Analisis Penerapan ISAK No. 35 tentang Pelaporan Keuangan Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi kasus di RSUD Kota Semarang) maka persamaannya adalah jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dan PSAK No. 45 sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek penelitian. Objek penelitiannya pada RSUD Kota Semarang. Peneliti sebelumnya berfokus pada lembaga yang telah berstatus BLU (Studi kasus di RSUD Kota Semarang) yang mempunyai pedoman sendiri dalam pelaporan keuangannya. Pengungkapan pelaporan keuangan tidak hanya berdasarkan PSAK 45 saja namun juga berdasarkan pada PMK No. 76/PMK.05/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit BLU. Sedangkan pada peneliti mengarah pada Lembaga Swadaya Masyarakat (studi kasus pada LSM Bengkel APPEK NTT).
 - b. Mayang Rineksi (2016) dengan judul : Evaluasi Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 revisi tahun 2011 terhadap Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada LSM SIGAB. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti adalah jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, pedoman PSAK No 45 dan

objek penelitiannya sama-sama mengarah pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Sri Nelva (2020), Analisis penerapan ISAK No. 35 terhadap laporan keuangan pada yayasan mts almanar kecamatan pujud kabupaten rokan. Hasil penelitian Sri Nelva Susanti yang berjudul “Analisis Penerapan ISAK No.35 Terhadap Laporan Keuangan pada Yayasan MTS AL-MANAR Kecamatan Pujun Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019 menyatakan bahwa :
 - a. Dasar pencatatan yang diterapkan di Yayasan Mts Al-Manar Pujud adalah menggunakan basis kas. Artinya aliran kas masuk dan kas keluar atau pendapatan yang diterima serta penerimaan uang dan biaya pada saat transaksi di Yayasan Mts Al-Manar Pujud dilakukan pada saat kas benar benar dikeluarkan, dan Dalam yayasan Mts Al-Manar Pujud hanya menunjukkan laporan posisi keuangan sehingga informasinya belum akurat.
 - b. proses akuntansi pada yayasan Mts Al- Manar Pujud belum sesuai dengan siklus akuntansi yang benar karena pihak yayasan hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum dan tidak membuat jurnal penerimaan kas. Tidak melakukan posting ke buku besar, daftar saldo dan jurnal penyesuaian.
 - c. Laporan keuangan yang disajikan dalam yayasan ini belum sesuai dengan ISAK No. 35 tentang keuangan nonlaba yang terdapat di Yayasan Mts AlManar Pujud , karena di yayasan ini hanya membuat laporan posisi keuangan saja dan laporan yang lain

belum dibuat sehingga komponen laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Mts Al- Manar Pujud belum lengkap.

Saskia Aurora, Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Dan Sak Etap Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Di Yayasan Ibu Cabang D.I Yogyakarta). Hasil penelitian Saskia Aurora Putri yang berjudul “Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan ISAK No.35 dan SAK ETAP tentang penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Cabang D.I Yogyakarta), Berdsarkan analisis data dan pembahasan mengenai Laporan keuangan Yayasan Sayap Ibu pada tahun 2018 bahwa Yayasan Sayan ibu dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ISAK No.35 dari dua puluh satu paragraf yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba berdasarkan ISAK No.35 terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan pada informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen, temporer dan terikat serta penyajian laporan arus kas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan Sayap Ibu memiliki kesiapan dalam penerapan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba berdasarkan ISAK No.35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasinonlaba sebesar 65% Dan 35% dilakukan belum memiliki kesiapan untuk menyusun laporan keuangan sesuai ISAK 35 dengan melakukan perbaikan terhadap penyajian laporan arus kas dan

pembatasan permanen,temporer, dan terikat.

4. PENERAPAN ISAK No. 35 pada organisasi Keagamaan AlMabrur Sukolilo surabaya. Hasil penelitian Nofi Lasfita dan Muslimin yang berjudul “Analisis penerapan ISAK No.35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid AlMabrur Sukolilo Surabaya” menyatakan bahwa pengelolaan dan pencatatan keuangan masjid AlMabrur Surabaya masih sederhana belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35 karena dalam pembuatan laporan keuangan hanya mengacu pada laporan keuangan pada umumnya dimana sistem penerimaan yang diperoleh dari Infaq Jumat, Idul Fitri, Iduladha, dan Infaq donatur dll. Jadi dalam penyajian laporan keuangan di Masjid AL Mabrur masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Analisis penerapan ISAK No. 35 tentang pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada gereja HKBP Maranata Silamosik pada Tahun 2020 dan dibanding dengan data Tahun 2021 dan Subjek diteliti pada Gereja HKBP Maranata Silamosik yaitu pihak yang ikut serta dalam Penerapan ISAK No. 35.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Nazir :

“Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa, pada masa sekarang”. Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Dengan demikian diharapkan Fenomena kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan yang berkompeten.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi data yang digunakan oleh penulis tidak hanya data yang bersifat kualitatif tetapi juga data yang bersifat kuantitatif.

Menurut Burhan Bungin, menyatakan bahwa:

“data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian- uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek”.

Menurut Lofland dalam buku Lexy J. Moleong:

“data kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, menurut Burhan Bungin data sekunder adalah: “Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder”.³⁶ Menurut Kuncoro, data sekunder adalah: “Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain”.

Data sekunder yang penulis peroleh dari gereja adalah dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan, jenis data sekunder ini antara lain:

1. Data yang bersifat kualitatif yaitu, berupa sejarah Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul, struktur organisasi gereja, tugas masing-masing jabatan dalam organisasi, dasar kebijakan dan penyusunan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan gereja.
2. Data yang bersifat kuantitatif yaitu, berupa laporan keuangan tahun 2020-2021 Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul, catatan-catatan yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data ada beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (*personal interview*) dengan melakukan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan

penelitian. Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan dalam hal ini bendahara Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul , bagian tata usaha gereja.

2. Dokumentasi, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat data-data dari dokumen, laporan keuangan Tahun 2018-2019 yang terdapat di Gereja HKBP Maranathajalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul.
3. Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah- majalah atau sumber data tertulis lainnya baik berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan laporan keuangan gereja.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan ketentuan laporan keuangan organisasi nonlaba yang telah diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35.

Tahap-tahap teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan bukti transaksi keuangan Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul, yaitu mengumpulkan bukti transaksi dengan dokumentasi.
2. Menyusun laporan keuangan Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul dengan siklus akuntansi seperti Jurnal Umum, Buku Besar, Neraca saldo sebelum penyesuaian, Jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian.
3. Menyusun laporan keuangan Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga

Timbul dengan siklus organisasi nonlaba yang terdapat pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yaitu membuat laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada laporan keuangan Gereja HKBP Maranatha jalan Desa Silamosik Resort Naga Timbul.